

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Khakim. 2005. *Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abrar Saleng. 2013. *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*. Makassar: Membumi Publishing.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amri Marzali. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arifin Tahir. 2011. *Kebijaksanaan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press.
- Bahder Johan Nasution. 1986. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju.
- Budi Winarmo. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chay Asdak. 2016. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elisabeth Nurhairani Butarbutar. 2019. *Metode Penelitian Hukum (Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: Refika Aditama.
- I Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Bandung: Nilacakra.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- M Irfan Islamy. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi aksara.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukti Fajar Nurdewata. 2010. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Munadjat Danusaputro. 1981. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Nanang Martono. 2015. *Metode Penelitian Sosial, Konsep dan Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ni'matul Huda. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cet. III. Jakarta: Nusamedia.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bima Ilmu.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholichin Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widianto, et al. 2003. *Fungsi dan Peran Agroforestri*. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Yohanes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Setya Nugraha. et al. 2006. *Potensi dan Tingkat Kerusakan Sumberdaya Lahan di Daerah Aliran Sungai Samin Kabupaten Krangayar dan Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006*. Surakarta: LPPM UNS.

C. Jurnal

- Delpita Yanti. 2018. Identifikasi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik. *Jurnal Perencanaan*. Vol 1 No. 1. 100.
- Hastuti. *et.al*. 2021. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang. *Journal Unismuh*. No. 2. 178.
- Jukka Miettinen. Chenghua Shi dan Soo Chin Liew. 2011. Deforestation Rates in Unsular Southeast Asia Between 2000 and 2010. *Journal Chage Biology*. Vol. 17 No. 7. 2261.
- Nasruddin. *et.al*. 2020. Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung (Studi di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*. No. 2. 228-229.
- Paiza. Muh said L dan Ayusari Wahyuni. 2021. Pemetaan Daerah Rawan Longsor Menggunakan Metode Pencitraan Satelit Di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. *Jurnal Geoelebes*. Vol. 5 No. 1. 86.

D. Internet

- Edy Arsyad. 2021, 15 September. Longsor di Enrekang, *Alih Fungsi Hutan Lindung jadi Lahan Perkebunan*. Di Akses 7 Oktober, 2024, FAJAR: <https://fajar.co.id/2021/09/15/longsor-di-enrekang-alih-fungsi-hutan-lindung-jadi-lahan-perkebunan/?page=all>.
- Eko rusdianto. 2023, 27 April. *Dilema Petani Bawang Merah di Enrekang: Rantai Rumit Utang, Penggundulan Hutan, dan Ancaman Pestisida*. Di Akses 7 Oktober, 2024, PROJECT MULTATULI: <https://projectmultatuli.org/dilema-petani-bawang-merah-di-enrekang-rantai-rumit-utang-penggundulan-hutan-dan-ancaman-pestisida/>.
- Pramono Dwi Susetyo. 2024, 1 Juni. *Hutan Lindung yang Mencemaskan*. Di Akses Oktober 7, 2024, Kompas: https://lestari.kompas.com/read/2024/06/01/140000686/hutan-lindung-yang-mencemaskan?page=all#google_vignette.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Kehutanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3632)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Nomor 3888)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5252)

Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 951)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)